ETIKA BERBASIS KEBEBASAN *Amartya Sen*

INTEGRASI KEBEBASAN DALAM PILIHAN SOSIAL, DEMOKRASI, DAN PEMBANGUNAN

SUNARYO

ETIKA BERBASIS KEBEBASAN AMARTYA SEN

ETIKA BERBASIS KEBEBASAN AMARTYA SEN

Integrasi Kebebasan dalam
Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan

Sunaryo

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

ETIKA BERBASIS KEBEBASAN AMARTYA SEN
Integrasi Kebebasan dalam
Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan
oleh Sunaryo

GM 617222019

Gedung Kompas Gramedia Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–37, Jakarta 10270

Desain isi dan sampul: Mulyono

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
anggota IKAPI, Jakarta, 2017

www.gpu.id

ISBN: 978-602-03-3820-0

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Kata Pengantar
Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen

Tidak banyak buku dan literatur di Indonesia yang secara serius membahas dan mengkaji pemikiran Amartya Sen di Indonesia. Buku karangan Dr. Sunaryo ini berhasil menjelaskan secara komprehensif dasar-dasar pemikiran Amartya Sen yang rumit dan tidak sering bertabrakan dengan keajekan struktur pemikiran yang selama ini dianggap *taken-for-granted*. Amartya Sen dikenal sebagai sosok pemikir dari negara berkembang yang menantang tata-pikir yang telah menjadi struktur dasar kesadaran ilmuwan dan tatanan masyarakat Barat. Di mana kesadaran Barat juga akhirnya diikuti oleh masyarakat di negara berkembang tanpa mempertanyakan ulang keabsahan premis dasar yang digunakan. Proyek besar Amartya Sen pada akhirnya adalah memberikan pemikiran alternatif atas hal-hal yang menjadi dasar pemikiran sehingga bentuk peradaban diharapkan lebih humanis.

Buku ini membahas ide-ide Amartya Sen tentang hubungan antara kebebasan dan kapabilitas. Menurut Amartya Sen, ide dan gagasan kebebasan tidak dapat dipisahkan dari konsep kapabilitas. Dalam hal ini, Amartya Sen dianggap sebagai salah satu tokoh '*developmentalism*' yang berhasil memasukkan aspek yang selama ini terlupakan dalam diskursus kebebasan. Selain itu, dalam buku ini, penulis menjelaskan posisi Amartya Sen terhadap pilihan rasional (*rational choice theory*). Dengan membaca buku ini, penulis ingin menyadarkan betapa pentingnya kritik terhadap teori pilihan rasional yang dibangun dari premis dasar maksimalisasi keuntungan. Bagi Amartya Sen, ada stimulan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional di luar motif keuntungan dan kemudian ia memberikan argumen alternatif atas tindakan-tindakan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori pilihan rasional tersebut.

Tidak hanya itu, buku ini juga membahas pemikiran Amartya Sen tentang konsep keadilan (*justice*), pilihan sosial, pembangunan, kemiskinan, serta etika dalam ekonomi dan kesenjangan (*inequality*). Penulis ingin menyajikan pokok-pokok pikiran Amartya Sen melalui pembahasan buku-buku penting karyanya. Dalam hal ini, penulis telah berhasil menarik benang merah posisi intelektual Amartya Sen. Bahkan, tinjauan historis-kultural sosok Amartya Sen pun dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh *genealogy* pemikiran Amartya Sen muncul ke permukaan.

Ilmu pengetahuan hanya akan bisa berkembang ketika mekanisme dialektika terjadi. Begitu juga buku ini yang menampilkan

kritik dari sejumlah ilmuwan terhadap pemikiran, ide, dan gagasan Amartya Sen. Dengan begitu, pembaca juga akan merasakan tidak ada kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan. Prinsip falsifikasi tetap menjadi rujukan bagaimana mengukur kualitas dari sebuah konsep dan teori. Dan dalam hal ini, penulis telah menunjukkan ide dan gagasan Amartya Sen memang kuat (*robust*) bukan karena tidak ada ruang untuk kritik, tetapi justru memberikan pemikiran alternatif muncul dan berkembang (*fruithfull principle*).

Meskipun dikategorikan sebagai buku yang serius dan akademis, buku ini ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti. Saya yakin semua elemen masyarakat dapat membaca dan memahami buku ini dengan baik. Selain itu, buku ini ditulis dengan alur dan struktur yang rapi dan mudah dimengerti. Dengan begitu, pemikiran Amartya Sen yang rumit, filosofis, konseptual, dan mendasar dapat lebih mudah dipahami. Penulisan buku ini penting sebagai usaha untuk diseminasi ilmu pengetahuan yang lebih luas sebagai manifestasi dari prinsip kebebasan dan kapabilitas Amartya Sen. Baginya, edukasi dan pendidikan kepada masyarakat merupakan salah satu cara bagaimana kemiskinan dapat dientaskan.

Sebagai Rektor Universitas Paramadina, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Sunaryo yang berhasil menuliskan secara baik garis pemikiran Amartya Sen. Semoga karya ini dibaca oleh khalayak luas dan dapat menginspirasi tidak hanya mahasiswa dan peneliti, tetapi juga perancang kebijakan dalam memutuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang baik. Semoga karya ini

juga mendorong kajian-kajian pemikiran alternatif sehingga pemahaman akan fenomena sosial-masyarakat menjadi lebih utuh dan kontekstual.

Selamat Membaca.

Prof. Firmanzah., Ph.D

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya buku ini terbit. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Gramedia Pustaka Utama yang sudah bersedia menerbitkan buku ini, khususnya kepada rekan Andi Tarigan dan tim. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan memperkaya bahan diskusi akademik mengenai filsafat moral, khususnya tentang filsafat moral Amartya Sen. Gagasan Sen mengenai etika berbasis kebebasan dalam kebijakan pembangunan dan proses keputusan demokrasi merupakan upaya untuk semakin meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai manusia. Kami berharap buku ini memberikan inspirasi tidak hanya bagi diskusi akademik, tetapi juga bagi mereka yang bergelut dengan kebijakan publik.

Buku ini merupakan edisi revisi dari penelitian doktoral saya di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Beberapa bagian,

buku ini sudah mengalami penyesuaian agar bisa dibaca dan dipahami oleh pembaca yang lebih luas. Beberapa kolega telah memberikan masukan yang sangat berguna terhadap penulisan buku ini. Inilah karya yang kami persembahkan dan semoga bermanfaat.

Tidak lupa, dengan terbitnya buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Dari STF Driyarkara, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, Dr. B. Herry-Priyono, Dr. Karlina Supelli, Prof. Dr. Alex Lanur, Dr. Mikhael Dua, Prof. Dr. J. Sudarminta, Prof. Dr. Sastrapratedja, Dr. Simon L. Tjahjadi, dan seluruh pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Kepada rekan-rekan di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) dan Nurcholish Madjid Society (NCMS), saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, Yudi Latif, Ph.D., Dr. Budhy Munawar-Rachman, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, (Ibu) Omi Komaria Madjid, Wahyuni Nafis, M.A., (Ibu) Dr. Sri Teddy Rusdy, Henry Simarmata, Fachrurozi, Goeswin Noer-Rizal, Ahmad Sapei, Hiton Bazawi, Edwin Arifin, Chandra Saputra, dan beberapa rekan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Kepada rekan-rekan di Program Studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Secara khusus kepada Aan Rukmana, M.A., M. Subhi Ibrahim, M.Hum., Pipip A. Rifai Hasan Ph.D., dan beberapa nama yang tidak disebutkan. Dari Herb Feith Foundation, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Djin Siauw dan Prof. Greg Barton. Terakhir kepada istri saya, Tri Widya Rani, dan dua putra saya, Fatih dan Farabi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ide kebebasan adalah salah satu ide besar yang kerap direfleksikan para filsuf dan pemikir di sepanjang sejarah. Pada umumnya, ada dua sisi kebebasan yang kerap direfleksikan. Yang pertama kebebasan sebagai kehendak bebas (*free will*) dan yang kedua sebagai kebebasan politik dan sosial. Dua sisi ini dirumuskan dalam istilah yang beragam oleh pemikir yang berbeda-beda. Isaiah Berlin (1909-1997), misalnya, pernah menulis "Two Concepts of Liberty" untuk menjelaskan kebebasan. Ia membagi konsep kebebasan menjadi kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif dipahami sebagai tidak adanya paksaan dan kebebasan positif sebagai kebebasan diri untuk menentukan sesuatu

(Berlin 2002, 169).[1] Philip Pettit juga mengidentifikasi dua macam kebebasan, yakni kebebasan psikologis yang terkait dengan masalah kehendak bebas (*free will*) dan kebebasan politik dalam arti tidak adanya rintangan yang berasal dari luar (Pettit 2001, 1-5).[2] Franz Magnis-Suseno membagi kebebasan menjadi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial (Magnis-Suseno 1987, 22-28). Kebebasan eksistensial dimaknai sebagai kemampuan untuk menentukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki secara normal.[3] Sementara pengertian kebebasan sosial dipahami sebagai tidak adanya paksaan yang dilakukan pihak lain secara sengaja.[4]

---

[1] Menurut Berlin, meskipun memiliki kemiripan, bila ditelusuri lebih jauh kita akan menemukan perbedaan yang signifikan dalam dua konsep ini. Saya akan menjelaskan pandangan Berlin lebih rinci dalam Bab 2.

[2] Pettit adalah seorang pemikir kontemporer yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Republikan. Dalam bab 5 saya akan menjelaskan lebih jauh konsepnya tentang kebebasan yang dipahami sebagai non-dominasi.

[3] Itu artinya sesuatu yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia tidak dianggap sebagai masalah kebebasan. Misalnya, jika kita tidak bisa terbang tanpa menggunakan alat apa pun, tidak bisa dimaknai kita tidak bebas karena keinginan itu berada di luar kemampuan kita sebagai manusia. Lih. Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), 23-26.

[4] Sementara jika dilihat sebagai "isme" atau paham, istilah liberalisme dipahami secara berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa lain. Milton Friedman pernah menjelaskan perkembangan dan perbedaan pengertian liberalisme. Pada abad ke-18, misalnya, liberalisme di Eropa mendorong sistem *laissez faire*, sementara di akhir abad ke-19 dan abad ke-20, khususnya pada tahun 1930-an di Amerika, liberalisme diasosiasikan sebagai kesiapan negara untuk mengantarkan masyarakat mencapai tujuannya. Pengertian liberalisme sudah bergeser dari konsep kebebasan itu sendiri ke konsep kesejahteraan dan kesetaraan. Di masa awal, perluasan kebebasan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan, namun di

Tema mengenai kebebasan juga menjadi salah satu tema besar yang masuk dalam pemikiran Amartya Sen, seorang ekonom yang memiliki minat pada filsafat dan teori-teori sosial.[5] Beberapa karya besarnya telah diabdikan untuk menjelaskan masalah kebebasan yang ia hubungkan dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan teori pilihan sosial (*social choice theory*). Pandangannya mengenai hal ini dapat dibaca dalam *The Idea of Justice* (2009), *Rationality and Freedom* (2004), *Development as Freedom* (1999), *Inequality Reexamined* (1992), dan dalam berbagai tulisan di banyak jurnal ilmiah. Paling tidak ada dua alasan mengapa ide kebebasan menjadi sangat penting bagi Amartya Sen sehingga selalu menjadi perspektif dalam analisis-

---

masa selanjutnya, kesejahteraan dan kesetaraan dianggap sebagai prasyarat bagi kebebasan. Dampak dari pemahaman terakhir ini adalah dimungkinkannya intervensi negara. Menurutnya, perkembangan ini dianggap sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan gagasan kebebasan sebelumnya. Lih. Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982 [1962]), 5-6. Perkembangan ini kemudian membuat pengertian liberalisme dipahami secara berbeda antara pemikir di Amerika dan Eropa. Di Amerika, kata liberal merujuk pada gagasan mengenai intervensi negara dan program-program 'negara kesejahteraan', sementara di Eropa, pengertian liberal dipahami sebagai paham yang mendorong sistem *laissez faire.* Lih. Bettina Bien Greaves, prakata dalam *Liberalism in the Classical Tradition* oleh Ludwig von Mises (San Francisco: Cobden Press, 2002), v. Lebih lanjut, menurut Kloppenberg, kebanyakan masyarakat Amerika di akhir abad 20 memaknai liberalisme secara kontras. Yang pertama, liberalisme merujuk pada New Deal—atau New Frontier atau Great Society—di mana idenya adalah membawa kesetaraan sosial yang lebih besar dengan mengandalkan peran pemerintahan federal. Yang kedua, kebanyakan masyarakat Amerika juga mengasosiasikan liberalisme dengan seruan pada kebebasan personal yang lebih besar dan dilindungi melalui intervensi pemerintah. James T. Kloppenberg, *The Virtues of Liberalism* (Oxford: Oxford University Press, 1998), 9-10.

[5] Amartya Sen menggunakan kata "freedom" dan "liberty" secara bergantian dalam karya-karyanya dan dapat dipertukarkan satu sama lain.

nya mengenai masalah ekonomi dan sosial. Yang pertama adalah karena kebebasan merupakan sesuatu yang bernilai pada dirinya dan yang kedua karena dengan kebebasan yang lebih besar, seorang individu dan masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih tujuan-tujuan yang hendak dicapai (Sen 1999, 18; 2009, 228). Pada alasan pertama, kebebasan dilihat sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya (*ends*), sementara pada alasan kedua kebebasan juga bisa menjadi sarana (*means*) untuk mencapai sesuatu.

Sen kemudian memahami kebebasan dalam dua aspek, yakni aspek proses dan aspek kesempatan real (*real opportunity*) (Sen 2009, 228). Kebebasan dalam aspek proses dimaknai sebagai kebebasan untuk memilih sesuatu yang dianggap baik tanpa ada paksaan dari pihak luar. Sementara dalam aspek kesempatan real, kebebasan dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap bernilai. Ia menyebut kebebasan dalam arti "kemampuan untuk mencapai" ini sebagai kapabilitas (*capability*). Konsep dan pendekatan kapabilitas menjadi ide sentral untuk memahami pemikiran Amartya Sen secara keseluruhan.

Sen membagi konsep kapabilitas menjadi dua, yakni kebebasan kesejahteraan (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) (Sen 2009, 288-289). Ia mendefinisikan kebebasan kesejahteraan sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu yang sangat menentukan kesejahteraan seseorang (Sen 1985, 201). Sementara kebebasan kepelakuan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang dianggap bernilai atau dianggap penting (Sen 1985, 203). Perbedaan dua kapabilitas ini ada pada maksud yang hendak di-

capai. Yang pertama terkait dengan kesejahteraan, sementara yang kedua terkait dengan kepelakuan. Ide kebebasan kepelakuan terkait erat dengan konsepsi mengenai yang baik (*the conception of the good*). Dalam pandangan Sen, ide kebebasan ini mengandaikan status pelaku yang memiliki tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dianggap baik (Sen 1985, 203-204). Ia kadang menyebut tindakan kepelakuan sebagai tindakan yang didasarkan pada komitmen (*commitment*). Dalam komitmen, seorang pelaku memutus hubungan antara pilihan tindakan yang diambil dan motif maksimalisasi kepentingan-diri (*self-interest*) (Sen 2009, 189). Melalui tindakan kepelakuan, ia melihat manusia sebagai pelaku (*doer*) dan juga pemutus/hakim (*judge*), sementara dalam kebebasan kesejahteraan, ia lebih melihat manusia sebagai penerima manfaat (*beneficiary*). Dengan pemahaman ini, ia menilai kebebasan kepelakuan memiliki tujuan yang lebih luas daripada kebebasan kesejahteraan, karena yang terakhir hanya berfokus pada satu tujuan, yakni keuntungan (*advantage*) (Sen 1985, 208).

Ide yang hendak ditegaskan Sen melalui kebebasan kepelakuan adalah pluralitas nilai dan motif dalam tindakan. Hal yang dianggap bernilai oleh seseorang bukan hanya aspek kesejahteraan atau manfaat (utilitas). Dengan kata lain, dalam pandangan Sen, maksimalisasi keuntungan bukan satu-satunya motif tindakan manusia. Dalam bertindak, seseorang bisa saja tidak mengejar keuntungan yang lebih besar untuk dirinya. Sen mengajukan contoh tindakan membela tanah air (patriotisme) dan solidaritas. Menurutnya, dalam tindakan ini seseorang tidak sedang memaksimalisasi kepentingan atau keuntungan yang bisa diraih. Yang terjadi dalam tindakan ini adalah si pelaku harus

melakukan hal itu karena tanggung jawab, meskipun ia sendiri tidak menyukainya atau tidak memperoleh keuntungan pribadi dari tindakan itu. Sen menamakan tindakan ini sebagai tindakan kepelakuan yang lebih didorong oleh komitmen.

Melalui konsep komitmen itu, Sen mengajukan kritik atas teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang oleh para ekonom arus utama dipahami sebagai pilihan yang dapat memaksimalisasi kepentingan-diri (*self-interest maximization*). Sebuah pilihan dapat disebut rasional jika dan hanya jika dapat memaksimalisasi kepentingan-diri. Jika pilihan rasional dipahami demikian, maka tindakan patriotik, solidaritas, dan seluruh tindakan yang didasarkan pada komitmen kepelakuan akan dianggap sebagai pilihan tidak rasional. Padahal, tindakan-tindakan semacam itu, bagi Sen, sesungguhnya tetap dapat dianggap rasional. Hanya saja, ukuran rasionalitas tidak dibatasi pada maksimalisasi kepentingan-diri. Oleh karena itu, ia kemudian mengajukan kritik dan evaluasi atas teori pilihan rasional. Alih-alih memahami pilihan rasional sebagai maksimalisasi kepentingan-diri, ia lebih memahaminya sebagai pemeriksaan kritis (*critical scrutiny*). Jika sebuah pilihan sudah dipertimbangkan secara kritis dan bernalar (*reasoned*), maka pilihan itu dapat disebut sebagai pilihan rasional, tidak peduli apakah tindakan itu memaksimalisasi kepentingan-diri atau tidak.

Selain mengajukan kritik atas teori pilihan rasional, Sen juga mengevaluasi teori pilihan sosial (*social choice theory*). Yang dimaksud dengan pilihan sosial adalah seluruh putusan kolektif yang diambil dari beberapa orang (dua orang atau lebih). Kebijakan publik dan kesepakatan bersama adalah beberapa contoh

pilihan sosial. Evaluasi atas teori ini terkait dengan idenya tentang kualitas hidup (*quality of life*). Ia sangat menekankan pentingnya perspektif kebebasan dan kapabilitas dalam relasi antar-sesama dan dalam perumusan kebijakan publik. Dua aspek kebebasannya menjadi dasar dalam mengevaluasi pandangan ekonomi mapan yang menilai keberhasilan dari tingginya pendapatan per kapita atau GDP.[6] Dalam pandangannya, kualitas hidup manusia tidak ditentukan oleh ukuran per kapita dan GDP, melainkan pada seberapa besar kebebasan dan kapabilitas yang dimiliki.[7] Dengan pandangan ini, ia mendorong agar kebijakan publik pemerintah

---

[6] GDP atau *Gross Domestic Products* adalah total nilai barang dan layanan yang diproduksi dalam satu tahun oleh sebuah negara. Biasanya, GDP dijadikan ukuran untuk melihat tingkat kemakmuran sebuah negara. Penjelasan teknis mengenai GDP dan juga GNP bisa dilihat dalam Donald Rutherford, *Routledge Dictionary of Economics* (London dan New York: Routledge, 1992), 175.

[7] Pada Februari 2008, Amartya Sen bersama Joseph Stiglitz dan Jean Paul Fitoussi diminta oleh Presiden Perancis saat itu, Nicholas Sarkozy, untuk merumuskan ukuran ekonomi yang lebih komprehensif sebagai alternatif dari model GDP yang ada selama ini. Di kalangan ekonom tampaknya sudah ada kesadaran bahwa ukuran GDP sejatinya tidak lagi memadai untuk menjelaskan kemajuan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, diperlukan ukuran-ukuran yang lebih komprehensif agar dapat memberikan gambaran capaian sosial dengan lebih baik. Salah satu pesan penting dari rumusan yang diajukan Sen dan rekan-rekan adalah menggeser perhatian dalam melihat kualitas hidup dari ukuran produksi ke kesejahteraan (*from production to well-being*). Kelemahan mendasar yang ada di dalam model GDP adalah karena data ini hanya memberikan informasi mengenai produksi yang dihasilkan, bukan kesejahteraan yang dapat dinikmati. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ukuran kesejahteraan adalah seluruh aspek yang terkait dengan kualitas hidup manusia seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, suara politik, hubungan sosial, keberlanjutan lingkungan yang baik, dan keamanan dari krisis ekonomi dan juga bencana alam. Lebih lanjut mengenai pandangan Sen dan rekan-rekan ini dapat dilihat dalam "Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress" di www.stiglitz-sen-fitoussi.fr

memerhatikan aspek kebebasan dan kapabilitas warga negaranya. Pandangan ini juga menjadi dasar baginya merumuskan konsep pembangunan. Hal yang harus dibangun bukan hanya dimensi kesejahteraan saja, tetapi juga kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berkeyakinan, kebebasan pendapat, kebebasan berserikat, dan lain-lain.

Sen mengkritik pendekatan pembangunan yang hanya memerhatikan aspek kesejahteraan sebagaimana yang terjadi di banyak negara. Ia mengkritik pandangan Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, yang mengatakan pembatasan kebebasan sipil dan politik akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang kemudian dikenal sebagai tesis Lee ini, dianut oleh banyak pemerintah di Asia, termasuk Indonesia di masa Orde Baru. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan sipil-politik lainnya. Dalam menanggapi pandangan ini, Sen menunjukkan tesis Lee ini sebenarnya tidak berdasar. Bila dilihat secara komparatif di banyak negara, pemerintahan yang demokratis justru memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan kesejahteraan dibanding pemerintahan yang otoriter. Terlepas dari kontribusi positif kebebasan bagi perluasan kesejahteraan, ia menilai kebebasan (pada dirinya) sebagai sesuatu yang penting bagi pembangunan manusia. Dalam pembangunan, aspek yang perlu diperluas bukan hanya kemampuan masyarakat mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga kebebasan mereka untuk berpendapat, berpolitik, dan berserikat.

Dalam buku ini, saya akan menunjukkan signifikansi kebebasan dan kapabilitas bagi kualitas hidup manusia dan juga bagi perumusan kebijakan publik. Dalam pandangan Sen, perlindungan kebebasan dan perluasan kapabilitas menjadi prasyarat agar kualitas hidup manusia bisa terjamin. Bagi setiap manusia di mana pun sejatinya hal terpenting adalah kebebasan dan kapabilitas, dalam arti tidak adanya pengekangan dan adanya kemampuan untuk meraih sesuatu yang dianggap bernilai. Sebagai seorang ekonom dan juga filsuf, Sen melihat ada masalah serius dalam pengukuran kualitas hidup manusia yang diukur secara ekonomistik. Seperti yang sudah ditegaskan, ia menolak capaian kualitas hidup diukur dengan pendapatan per kapita dan GDP. Dari kritik ini, ia mengevaluasi pengertian rasionalitas pilihan yang sudah diringkus dalam kerangka manusia ekonomi (*homo economicus*). Ia juga memodifikasi teori pilihan sosial (*social choice theory*) yang kurang mempertimbangkan kebebasan. Keresahan dan catatan Sen atas hal-hal tersebut bertumpu pada pentingnya kebebasan. Kebebasan merupakan sesuatu yang bernilai pada dirinya (*ends*) dan bisa menjadi sarana (*means*) untuk sesuatu yang lain. Dengan kebebasan yang lebih besar, kita dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai sesuatu yang lain.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, saya merumuskan pandangan etika Sen yang menjadi dasar baginya dalam melihat manusia dan pilih-